

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media massa dan media sosial memiliki peran dalam proses formulasi kebijakan yaitu media mampu memengaruhi *agenda setting* kebijakan sehingga bagi masyarakat, advokat kebijakan, aktivis, maupun aktor politik dapat menggunakan media untuk memberi tekanan dan mengadvokasi kebijakan. Di samping itu, berkaitan dengan respon publik terhadap kebijakan pemindahan IKN, terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah UU IKN disahkan terutama pada jumlah pemberitaan di media massa, jumlah percakapan netizen di *Twitter* dan *Facebook*, serta sentimen yang terbentuk di media massa dan media sosial. Sedangkan pada subaspek *top issue* dan *feedback* tidak dapat dikatakan sebagai perbedaan melainkan sebagai sebuah perkembangan atau kelanjutan dari periode sebelumnya.

Banyaknya jumlah pemberitaan di media massa dan perbincangan netizen di *Facebook* dan *Twitter* menggambarkan besarnya atensi dan respon yang diberikan publik terhadap kebijakan IKN. Jika dilihat berdasarkan sentimen, respon publik di media massa lebih memberikan dukungan sedangkan di media sosial terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok yang mendukung menolak kebijakan pemindahan IKN. Kemudian, jika dilihat dari isu yang berkembang baik di media sosial maupun di media massa, isu-isu yang dibahas hampir seluruhnya sama. Hal ini karena keduanya saling

mempengaruhi satu sama lain sehingga apa yang diberitakan di media massa juga menjadi perbincangan di media sosial begitu pula sebaliknya.

Berbagai isu yang muncul tersebut dapat dapat direspon oleh pemerintah melalui berbagai tindakan baik dalam bentuk regulasi, informasi, maupun pelayanan. Pada beberapa isu seperti terjadinya pandemi dan isu kebijakan pendanaan IKN yang kontroversial, respon media dan publik dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan yang tidak hanya memberikan klarifikasi tetapi juga melakukan tindakan yang lebih tegas seperti perancangan, penundaan atau pembatalan kebijakan. Dengan begitu, ada keterkaitan antara agenda publik, agenda media, dan agenda kebijakan.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka implikasi dalam penelitian ini ialah para pengambil kebijakan harus memperhatikan, mempertimbangkan, dan merespon aspirasi yang disalurkan oleh publik baik melalui media massa maupun media sosial. Kemudian, bagi publik, advokat kebijakan, politisi, maupun aktivis dapat memanfaatkan media massa maupun media sosial untuk menyalurkan aspirasi dan memengaruhi *agenda setting* kebijakan sebab media memiliki peran dalam proses formulasi kebijakan.